**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SEKOLAH TENTANG POIN PELANGGARAN TATA TERTIB SISWA DALAM MEMBENTUK PERILAKU SISWA YANG BERKARAKTER DI SMA NEGERI 7 KEDIRI**

**Churiyatul Qisthi Rodhiyah dan Annisa Rahmadiah Ali**

*State Colleges of Islamic Studies (STAIN) Kediri, Indonesia*

**Mufarrihul Hazin**

State Colleges of Islamic Studies (STAIN) Kediri, Indonesia

ABSTRACT: Salah satu masalah yang paling urgen untuk segera ditangani di Indonesia adalah persoalan pendidikan karakter pada siswa. Dengan demikian, sekolah memiliki peran yang sangat penting dalam membangun dan membentuk perilaku para generasi muda supaya menjadi generasi yang berkarakter. Penelitian ini bertujuan untuk: 1). mendeskripsikan model pelaksanaan kebijakan sekolah tentang poin pelanggaran tata tertib siswa 2). mendeskripsikan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan kebijakan sekolah tentang poin pelanggaran tata tertib siswa. 3). mendeskripsikan upaya-upaya mengatasi hambatan dalam melaksanakan kebijakan sekolah tentang poin pelanggaran tata tertib siswa. 4). mendeskripsikan implementasi kebijakan sekolah tentang poin pelanggaran tata tertib siswa di SMAN 7 Kediri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui pendekatan kualitatif dengan jenis study kasus. Objek yang diteliti adalah SMAN 7 Kediri. Peneliti mengobservasi suatu kebijakan yang telah ada dengan menggunakan pengamatan, wawancara langsung dan studi dokumen. Dalam wawancara peneliti melibatkan WAKA Humas, Tim Tata Tertib (Tatib), guru BK, serta peserta didik. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, yaitu kondensasi data, display data, dan menarik kesimpulan. Keabsahan data menggunakan triangaluasi dan diskusi teman sejawat.

Hasil penelitian ini menunjukkan: 1). Pelanggaran tata tertib siswa dengan menggunakan poin pelanggaran, 2). Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan tata tertib siswa meliputi hambatan lingkungan fisik sekolah dan kesadaran siswa. 3). Upaya mengatasi hambatan pelaksanaan tata tertib siswa dilakukan dengan cara kepala sekolah mengadakan pembinaan guru, karyawan, dan semua elemen yang ada di sekolah 4). Dampak kebijakan sekolah adalah jumlah pelanggaran yang dilakukan siswa menurun, perilaku siswa sudah mulai menunjukkan adanya perilaku yang berkarakter diantaranya, berdisiplin, menghormati norma-norma hukum yang berlaku, bertanggung jawab, bergaya hidup sehat.

**Katakunci: Pendidikan karakter, kebijakan, poin pelanggaran.**

1. Pendahuluan

Sekolah merupakan suatu lembaga pendidikan yang notabennya berperan untuk membentuk perilaku, watak, kepribadian dan menimba ilmu bagi siswa sehingga terbentuklah siswa yang berkarakter dan berbudaya luhur. Disisi lain sekolah dipandang sebagai suatu masyarakat yang utuh dan bulat serta memiliki kepribadian sendiri, menjadi tempat untuk menyelenggarakan proses belajar mengajar. Selain itu, sekolah juga berperan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, dalam artian menumbuhkan, memotivasi dan mengembangkan nilai-nilai budaya yang mencakup etika, logika, estetika dan praktika sehingga terciptalah manusia yang utuh dan berakar pada budaya bangsa. Menurut Heru Wibowo (2010) dalam kehidupan masyarakat yang semakin maju dan berkembang seperti sekarang ini persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat semakin kompleks, karena adanya perubahan-perubahan dalam berbagai kehidupan masyarakat. Dalam membentuk perilaku yang berkarakter, SMAN 7 Kediri membuat kebijakan tentang peraturan dan tata tertib yang berkaitan dengan pembentukan

perilaku siswa sehingga pengaruh negatif dari luar dapat diminimalisir dan juga dihindari. Dengan adanya peraturan dan tata tertib sekolah yang baik dan disepakati oleh semua pihak, yaitu guru, karyawan, siswa, orang tua siswa, komite sekolah, maka diharapkan kegiatan pembelajaran di sekolah dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Dalam hal ini menurut Edward (1980), terdapat empat aspek dalam pengimplementasian suatu kebijakan yakni, dari segi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Namun titik tumpu terberat kami dalam penelian ini adalah pada segi disposisi, yaitu pada poin pelanggaran tata tertib siswa dalam membentuk perilaku siswa yang berkarakter. Hal ini karena peneliti merasa poin pelanggaran tata tertib siswa sangat menentukan perilaku siswa yang berkarakter dalam mengimplementasikan kebijakan sekolah tentang poin pelanggaran tata tertib siswa.

Sebagaimana disebutkan diatas dalam UU

Sisdiknas No.20 Tahun 2003 pasal 1 ayat 1 didalamnya terkandung harapan-harapan yang sangat mulia yaitu terciptalah siswa yang memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian yang baik serta akhlak yang mulia, namun melihat realita yang terjadi, dalam pelaksanaannya di SMPN 7 Kediri masih banyak penyimpangan-penyimpangan perilaku yang dilakukan oleh siswa. Hal ini ditunjukkan dengan masih banyaknya siswa yang berperilaku tidak disiplin dan tidak bertanggung jawab, baik diluar sekolah maupun didalam lingkungan sekolah seperti siswa datang terlambat, siswa tidak menggunakan atribut lengkap, tidak mengerjakan tugas dari guru, memakai baju tidak sesuai dengan ketentuan sekolah, tidak sopan kepada bapak ibu guru dan lain sebagainya.

Dengan menegakkan peraturan dan tata tertib sekolah, maka diharapkan akan terbentuk siswa yang disiplin dan bertanggung jawab, sehingga masalah pelanggaran-pelanggaran moral yang sering terjadi seperti datang terlambat, dikelas ramai, dan lain sebagainya dapat ditekan seminimal mungkin. Untuk mewujudkan semua itu, perlu adanya formula khusus agar tata tertib dapat dijalankan secara efektif dan efisien., dengan peraturan tata tertib yang baik dan sudah disetujui oleh semua elemen sekolah, juga dijalankan dengan benar, diharapkan dapat menciptakan situasi dan kondisi sekolah cukup kondusif. Situasi yang kondusif dapat membantu kegiatan belajar mengajar berlangsung tenang dan aman, sehingga siswa dapat mencapai prestasi yang optimal. Kita mengetahui bahwa tiap kelompok kesatuan sosial sekecil apapun, keluarga, kelompok bermain, misalnya selalu mempunyai peraturan-peraturan tertentu, yang sedikit banyak berbeda antara yang satu dengan yang lain. Adanya peraturan-peraturan itu antara lain adalah untuk menjamin kehidupan yang tertib dan tenang, hingga, kelangsungan hidup sosial itu dapat dicapai, kewajiban anggota baru bagi kelompok sosial adalah menyesuaikan diri terhadap peraturan-peraturan tersebut. Setiap pelanggaran akan mengakibatkan gangguan bagi anggota kelompok bahkan kehidupan seluruh kelompok (Sujanto: 1996).

Demikian halnya dengan kedatangan siswa di sekolah di sekolah ia menjadi anggota baru bagi masyarakat sekolah, barulah diketahui oleh siswa bahwa dalam kesatuan sosial tersebut terdapat peraturan dan tata tertib sekolah, yang berlaku baginya, dan bila ia tidak dapat menyesuaikan ia akan menjadi pengganggu tata tertib yang berarti ia melanggar tata tertib. Peraturan tata tertib di sekolah selalu dilengkapi dengan sanksi-sanksi tertentu, yang berpuncak kepada pemberian hukuman. Pelanggaran-pelanggaran di dalam kelas dapat diberi sanksi langsung secara bertahap misalnya: diperingatkan, ditempatkan terpisah dari siswa lainnya, diberi tugas saat istirahat, dikeluarkan dari kelas (Bill Rogers dalam A.D. Rahayu Ratnaningsih: 2004).

1. Metode Penelitian

Penilitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis studi kasus. Objek penelitian yang digunakan yaitu di SMAN 7 Kediri. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui observasi, wawancara langsung, dan dokumentasi. Dalam wawancara langsung peneliti melibatkan WAKA Humas, Tim Tata Tertib (Tatib), guru BK, serta peserta didik.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif Miles dan Huberman (2012), yaitu kondensasi data, display data, dan menarik kesimpulan. Keabsahan data menggunakan triangaluasi dan diskusi teman sejawat.

Uji keabsahan data yang digunakan yaitu: uji kredibilitas (melalui triangulasi sumber dan teknik), uji transferability (melalui penyusunan hasil penelitian secara rinci, jelas, sistematis dan dapat dipercaya), uji dependability (melalui audit keseluruhan proses penelitian), dan uji confirmability (melalui publikasi hasil peneltian).

1. Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian yang dipaparkan merupakan hasil analisis dan validasi dan sudah merupakan hasil proses kondensasi dari SMAN 7 Kediri yang menjadi objek penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan: 1). Pelanggaran tata tertib siswa menggunakan sistem poin pelanggaran, 2). Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan tata tertib siswa meliputi hambatan lingkungan fisik sekolah dan kesadaran siswa. 3). Upaya mengatasi hambatan pelaksanaan tata tertib siswa dilakukan dengan cara kepala sekolah mengadakan pembinaan guru, karyawan, dan semua elemen yang ada di sekolah 4). Dampak kebijakan sekolah adalah jumlah pelanggaran yang dilakukan siswa menurun, perilaku siswa sudah mulai menunjukkan adanya perilaku yang berkarakter diantaranya, berdisiplin, menghormati norma-norma hukum yang berlaku, bertanggung jawab, bergaya hidup sehat.

* 1. *Pelanggaran tata tertib siswa menggunakan sistem poin pelanggaran.*

Sistem poin ini sudah sejak lama diberlakukan oleh SMAN 7 Kediri, salah satu bentuk nyatanya dari sistem pelanggaran ini adalah setiap anak memiliki buku saku sendiri untuk mengetahui berapa nilai dari pelanggaran yang sudah dilakukan oleh peserta didik. Selain itu buku saku juga sebagai pengingat sudah berapa kali peserta didik melakukan pelaggaran dan berapa point yang sudah diterima oleh peserta didik dari beberapa pelanggaran yang dilakukan. Sebagaimana yang telah ditetapkan kepala sekolah SMAN 7 Kediri tahun 2016 pada pasal 18 tentang poin pelanggaran peserta didik ,Bagi peserta didik yang mendapatkan poin 5-15 biasanya dihukum dengan dengan cara menyanyikan Indonesia Raya, membersihkan Mushola dan membersihkan lapangan sekolah karena itu masih kategori poin ringan, dimana poin ringan yang dimaksudkan tersebut meliputi:

1. Melepaskan sepatu pasa saat jam pelajaran tanpa seizing guru yang bersangkutan (1 poin).
2. Duduk dengna kaki diatas bangku/meja (2 poin).
3. Duduk diatas meja (2 poin).
4. Peserta didik putra memakai gelang/kalung/anting-anting atau aksesoris lainnya, kecuali jam tangan (5 poin).
5. Peserta didik putra ditatto atau ditindik (5 poin).
6. Peserta didik putri ditindik pada kedua telinga lebih dari dari sepasang (5 poin).
7. Perserta didik memakai perhiasan dan atau *make up* berlebihan (3 poin).
8. Makan, minum, menghisap kembang Gula pada waktu pembelajaran berlangsung tanpa seizing guru yang bersangkutan (3 poin).
9. Mengendarai mobil sekolah (5 poin)
10. Menggunakan Walkman/HP dan alat pemain lainnya yang tidak ada hubungannya dengan pelajaran pada waktu pelajaran sedang berlangsung (5 poin)
11. Meminjamkan HP atau alat komunikasi kepada teman pada saat KBM/ Upacara sedang berlangsung (5 poin).
12. Penyalahgunaan jam pembelajaran untuk makan minum dikantin atau untk bermain termasuk membolos pada jam pelajaran (5 poin).
13. Penyalahgunaan fasilitas sekolah yang tidak sesuai dengan peruntukannya (5 poin)
14. Membuat kegaduhan didalam kelas dan lingkungan sekolah pada waktu pembelajaran (5 poin).
15. Mengotori, mencoret-coret, merusak fasilitas milik sekolah atau pihak lain (5 poin).
16. Memindahkan fasilitas milik sekolah atau pihka lain tanpa alasan yang dipertanggung jawabkan (3 poin)
17. Tidak membersihkan sekitar tempat duduk 1 meter kiri dan kanan depan belakang (15 poin).
18. Menaiki kendaraan melebihi batas yang ditentukan (5 poin).
19. Terlambat masuk jam pelajaran kurang dari 20 menit setelah bel berbunyi (3 poin).
20. Tidak membawa buku/ kartu ketertiban (3 poin).
21. Tidak masuk tanpa keterangan (5 poin).
22. Membolos (5 poin).
23. Tidak masuk dengan keterangan palsu (20 poin).
24. Tidak mengikuti upacara tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan (10 poin).
25. Baju lenan panjang dilipat (2 poin).
26. Kancing baju dan atau lengan tidak dikancingkan (3 poin)
27. Tidak memakai *badge* atau atribut (3 poin).
28. Tidak memakai kaos dalam sesuai dengan ketentuan (2 poin).
29. Atribut sekolah diberi warna wani (5 poin).
30. Berkuku panjang atau dicat (2 poin).
31. Celana/rok sekolah yang ujungnya melebihi panjang kaki (2 poin).
32. Celana/rok sekolah yang ujungnya tidak dijahit (2 poin).
33. Baju-rok ketat dan atau panjangnya tidak sesuia dengan ketentuan sekolah (5 poin).
34. Warna jilbab tidak polos/ tidak sesuia dengan ketentuan sekolah atau ujung jilbab tidak dipanjangkan sampai menyentuh ikat pinggang (5 poin).
35. Rambut peserta didik putri keluar dari jilbab dengan disengaja (5 poin).
36. Peserta didik putra putri tidak memakai ikat pinggang warna hitam (3 poin)
37. Memakai seragam yang tidak sesuai dengan sengaja (5 poin)
38. Mengenakan model seragam sendiri atau mnggunaan bahan dan atau warna yang tidak sesuai dengan ketentuan sekolah (5 poin)
39. Memasang handsaplas pada baju atau celana seragam sekolah (5 poin)
40. Memakai sepatu sandal tanpa alsan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (5 poin)
41. Perlemngkapan sekolah ada gambar, graffiti: seronok (10 poin)
42. Tidak memakai seraham sekolah (5 poin)
43. Baju peserta didik tidak dimasukkan (5 poin)
44. Celana/rok/baju seragam sekolah ada graffiti/gambar/tulisan, kumal, sobek dengan sengaja (10 poin)
45. Rambut panjang (bagi peserta didik putra) dan atau dicat dan atau potongan tidak rapi (5 poin).
46. Tidak memakai nametake atau border nama pada seragam (2 poin).

Sedangkan untuk kategori berat yakni poin 20-101 maka akan dilakukan tidak lanjut mulai dari dipanggil orang tuanya, mendapat scors hingga dikeluarkan dari sekolah. Dimana yang termasuk dalam kategori berat tersebut, diantaranya: membawa senjata tajam, berkelahi antar peserta diluar maupun di dalam pihak sekolah, membawa memperjualbelikan dan mengonsumsi narkoba, peserta didik putri hamil, menganiaya atau mengeroyok kepala sekolah, guru dan karyawan, peserta didik putra berpacaran hingga menghamili, mencuri barang/uang.

Hasil penelitian ini sesuai dengan Permendiknas no. 19 tahun 2007 tentang peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh satuan Pendidikan Dasar dan Menegah adalah:

 Pada lampiran no.9 tentang Budaya dan lingkungan Sekolah/Madrasah bagian d adalah tata tertib sekolah/madrasah ditetapkan oleh kepala sekolah/madrasah melalui rapat dewan pendidik dena mempertimbangkan masukan komite sekolah/ dan peserta didik.

 Adanya penegakan tata tertib ini bertujuan agar peserta didik jera dan tidak akan melakukan kesalahan yang sama lagi. Apabila peserta didik melakukan kesalahan yang sama lagi maka dari pihak tantib akan mengirim ke kelas-kelas yang bukan kelasnya untuk menyayikan lagu kebangsaan. Hal ini sesuai dengan motto sekolah yang tercantum dalam buku saku tersebut yakni “**Mewujudkan Ketertiban dengan Kesederhanaan**”.

* 1. *Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan dalam tata tertib siswa meliputi hambatan fisik sekolah dan kesadaran siswa.*

Pada suatu sistem disetiap intansi maupun sekolah dalam mengeluarkan kebijakan pasti memiliki hambatan-hambatan, namun dari hambatan dapat diambil makna yang belum dimiliki pada kebijakan tersebut. Faktor yang menyebabkan hambatan pelaksanaan kebijakan adalah masih kurangnya kesadaran siswa dan sarana yang dimiliki oleh sekolah tersebut. Masih ada beberapa siswa yang masih belum sadar akan ketertiban.

Selain pada kesadaran dari siswa yang kurang dari bidang administrasinya juga belum cukup memadai, hal ini diutarakan oleh narasumber yakni Ibu Wiwik, beliau berkata bahwa yang menjadi kendala pada sitem point pelanggaran ini adalah administrasi baik itu administrasi daftar ulang maupun administrasi PPDB, alasannya apabila administrasi sudah bersih tidak akan lagi ada pengurangan maupun pelebihan dari siswa. Dan itu akan memepermudah staf dalam pemasukan data pada penilaian akhir.

* 1. *Upaya mengatasi hambatan pelaksanaan tata tertib siswa dilakukan dengan cara kepala sekolah mengadakan pembinaan guru, karyawan, dan semua elemen yang ada di sekolah*

Keberadaan faktor sumber daya dalam rangka menjalankan kebijakan poin pelanggaran pada SMAN 7 Kediri memegang peranan sangat peting dalam keberhasilan kebijakan. Tanpa kecukupan sumber daya, apa yang direncanakan tidak akan sama dengan apa yang akhirnya diterapkan.

Menurut Edward III (1980:53) sumber daya (*resources*) yang dimaksud dalam implementasi kebijakan adalah pelaksana kebijakan. Agar dapat dilaksanakan dengan baik, kesiapan sumberdaya pelaksana kebijakan publik adalah hal penting untuk diperhatikan. Kesiapan sumberdaya meliputi kualitas dan kuantitas staf pelaksana, ketersediaan informasi yang memadai, kewenangan yang diberikan kepada pelaksana kebijakan serta ketersediaan sarana dan prasarana penunjang dalam pelaksanaan kebijakan.

Hasil penelitian menujukkan bahwa pihak Tantib yang beperan langsung dalam hal ini sering sekali diingatkan oleh kepala sekolah untuk memberikan pembinaan pada peserta didik yang memiliki banyak poin pelanggaran, selain itu kepala sekolah juga memberikan pembinaan pada elemen sekolah seperti satpam dan guru piket agar tidak memberikan izin pada sembarang siswa agar proses belajar mengajar tetap berjalan dengan baik.

* 1. *Dampak kebijakan sekolah adalah jumlah pelanggaran yang dilakukan siswa menurun.*

Dalam hal ini sekolah sudah memenuhi salah satu misinya yakni berbudaya yaitu, berprilaku sopan dan bertutur kata sopan, peduli terhadap sesama dan lingkungan, menghargai budaya bangsa.

Menurut pandangan Edwards (1980) informasi kebijakan pendidikan perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar pelaku kebijakan dapat mengetahui, memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran kebijakan agar tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan secara jelas dan konsisten.

Dari penjelasan Edward tersebut sesuai dengan hasil penelitian setelah terdapat pembiasaan pada sasaran kebijakan, metode poin pelanggaran merupakan cara yang efisien untuk mengontrol pelanggaran peserta didik, karena poin pelanggaran sangat mudah dimengerti bagi kelompok sasaran kebijakan. Selain poin pelanggaran dapat mempengaruhi nilai akademik siswa, pada sistem poin pelanggaran ini juga menjadi acuan bagi wali kelas untuk kenaikan siswanya.

1. KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil wawancara yang mendalam, dokumentasi dan observasi mengenai implementasi kebijakan sekolah tentang poin pelanggaran yang dilakukan di SMAN 7 Kediri dapat disimpulkan bahwa: 1). kebijakan sekolah mengenai poin pelanggaran ini sangat membantu bagi peserta didik untuk membentuk karakter. Selain salah satu visi dari sekolah tercpai yakni berperilaku sopan dan bertutur kata santun, peduli terhadap sesama dan lingkungan, menghargai budaya bangsa, hal ini semakin memperjelasan keefesienan dari kebijakan. 2). faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan sekolah ini adalah adanya komunikasi tindak lanjut antara tatib dan pihak wali kelas, menjadikan siswa selalu terawasi. 3). Dampak setelah ditetapkannya implementasi program pembiasaan dalam upaya pengembangan pendidikan karakter adalah kondisi sekolah
yang semakin kondusif, terjadi hubungan kekerabatan antara peserta didik dengan peserta didik dan peserta didik dengan guru. Dampak terhadap lingkungan terlihat signifikan dengan pelaku (peserta didik) senantiasa mengaplikasikan program ini di rumah.

DAFTAR PUSTAKA

A.D.Rahayu Ratna Ningsih. (2004). *Pemulihan Perilaku,* Jakarta: PT Gramedia Widia Sarana Indonesia.

Dunn, William N. (2000). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Edisi Kedua. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Edwards III, George C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington D.C. Congressional Quarterly Inc.

Faridatul Mardlotillah, “Implementasi Kebijakan Sekolah dalam Upaya Pengembangan Pendidikan Karakter melalui Program Pembiasaan Membaca Al-Qur’an” *Jurnal Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan*(Juli, 2013) Vol 1, No. 2

Kartu Tata Tertib Peserta Didik SMAN 7 Kediri.

Kecamatan Turen Kabupaten Malang”, *Jurnal Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan*(Januari, 2013) Vol 1, No 1.

Rahmawati, Dwi Bintang, Hubungan Pelaksanaan Tata Tertib Sekolah dengan Pendidikan Moral di SMP Negeri 11 Surabaya*,* 2014. *Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, Nomor 2 Volume 1.

Rasyid, Fathor. *Metodologi Penelitian Sosial Teori dan Praktik.* Kediri: STAIN Kediri Press, 2015.

Sita Acetylena, “Analisis Implementasi Kebijakan Pendidikan Karakter di Perguruan Taman Siswa

Solihuddin, Muhammad, Dampak Kebijakan Sekolah Tentang Poin Pelanggaran Tata Tertib Siswa dalam Membentuk Perilaku Siswa yang Berkarakter, *Jurnal Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan* Volume 1, Nomor 1 Januari 2013,62-70 ISSN: 2337-7623; EISSN: 2337-7615.

Sujanto, Agus. (1996). *Psikologi Perkembangan, Rineka,* Jakarta: Cipta.

Undang-undang Nomor: 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.